
PERAN FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION) DALAM MENGUPAYAKAN KETAHANAN PANGAN DI PAPUA NEW GUINEA TAHUN 2021-2023

Oleh

Feneshia Judhit Judanti¹, Christian H.J de Fretes², Indra Wisnu Wibisono³

^{1,2,3}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga

Email: ¹1372021005@Student.uksw.edu, ²christian.defretes@uksw.edu,

³indra.wibisono@uksw.edu

Article History:

Received: 14-05-2025

Revised: 08-06-2025

Accepted: 17-06-2025

Keywords:

FAO, Papua New Guinea,
Ketahanan Pangan, Food
Security

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran FAO sebagai organisasi internasional dalam mengupayakan ketahanan pangan dalam upaya penanganan kerawanan pangan di Papua New Guinea pada tahun 2021-2023. Diketahui tahun 2021-2023 pemenuhan bahan makanan yang berkelanjutan belum stabil bahkan cenderung menurun, kondisi kerawanan pangan ini terjadi akibat berbagai faktor seperti bencana alam tanah longsor di beberapa wilayah, mengalami curah hujan ekstrim yang menyebabkan banjir pada tahun 2024, serta penyalahgunaan penebangan hutan dalam skala besar. Akibatnya masyarakat memiliki keterbatasan terhadap akses pemenuhan pangan yang berkelanjutan yang mengakibatkan food insecurity, 44,4% balita memiliki status kekurangan gizi akibat dari kerawanan pangan. Dengan adanya bantuan pemrograman dalam sektor pertanian serta bantuan peningkatan pengelolaan sumber daya alam oleh Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai organisasi internasional. Kerjasama ini bertujuan untuk menekan kerawanan pangan yang meningkat karena mayoritas mata pencaharian masyarakat dalam sektor pertanian, kurangnya bantuan dari pemerintah serta kesadaran masyarakat, kesejahteraan dan kualitas hidup secara berkelanjutan akan mengkhawatirkan. Dengan menggunakan teori liberalisme institusional dan konsep organisasi internasional, food security, ketahanan pangan, penelitian ini menganalisis di wilayah Papua New Guinea. Hasil dari penelitian ini menunjukkan FAO memiliki beberapa bantuan yang berfokus seperti pada peningkatan sumber daya alam, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan ketahanan pangan di Papua New Guinea

PENDAHULUAN

Terpenuhinya bahan pangan merupakan hal yang mendasar untuk seluruh manusia, karena pangan merupakan hal yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditunda, baik oleh manusia itu sendiri maupun negara yang berkewajiban untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan pangan yang terpenuhi, aman, dan bergizi seimbang dalam tingkat nasional sampai di daerah dengan secara merata di negaranya (Rumawas et al., 2021). Maka dari itu terpenuhinya bahan makanan yang berkelanjutan dan dapat diakses setiap waktu dapat dikatakan sebagai ketahanan pangan, karena hal ini berguna untuk menciptakan kehidupan manusia yang berkualitas, dengan terpenuhinya kebutuhan pangan secara tidak langsung kehidupan masyarakat menjadi lebih stabil baik dari segi kesehatan, perekonomian, sosial, dan politik, selain itu juga untuk kebutuhan berkelanjutan mereka. Dengan terpenuhinya bahan pangan angka kelaparan, malnutrisi serta ketidak stabilan perekonomian dapat berkurang. Oleh karena itu ketahanan pangan harus mudah diakses di berbagai situasi baik dalam tingkat nasional maupun individu yang tercukupi dengan kebutuhan pangan yang memadai, hal ini tidak hanya mencakup jumlah atau kualitas namun harus bersifat aman, bernutrisi serta dapat diakses dengan mudah dan merata dapat dijangkau oleh semua kalangan (Moh et al., 2023).

Ketahan pangan merupakan isu nasional bahkan menjadi isu internasional, dengan tidak terpenuhinya bahan makanan dan susah dalam akses memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar ini dapat terjadi kerawanan pangan atau *food insecurity*. *Food insecurity* di suatu negara dapat menjadi isu global karena dalam ranah internasional telah terdapat *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda 2030 yang telah disepakati semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), SDGs terdapat 17 point utama (UNDIKNAS, 2024) pada tujuan yang ke-2 di SDGs yaitu untuk mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dengan cara setiap negara dapat memiliki ketahan pangan, peningkatan gizi untuk semua kalangan dan memiliki sektor pertanian berkelanjutan (Silvia, 2022). Oleh karena itu jika pada poin ke-2 tidak terpenuhi maka kerawanan pangan atau *food insecurity* dapat menjadi isu internasional. Tidak hanya dalam tingkat internasional saja yang harus memiliki tujuan berkelanjutan setiap negara juga harus memiliki tujuan keberlanjutan seperti dalam tingkat nasional Papua New Guinea memiliki rencana pembangunan menengah jangka panjang yang berguna untuk menguntungkan semua warga Papua New Guinea yang masing-masing memiliki tanggung jawab dan kepentingan bersama dalam mencapai ketahanan pangan berkelanjutan.

Yang menangani permasalahan ketahanan pangan ini tidak hanya negara itu sendiri namun organisasi internasional juga telah menyoroti tentang permasalahan ketahan pangan maka dapat dikatakan jika ketahan pangan begitu penting dan perlu adanya penyelesaian yang dilakukan oleh negara dengan dibantu organisasi internasional yang berfokus untuk menangani hal seperti ini. Karena masyarakat serta kebijakan negara belum bisa menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan yang berkelanjutan, organisasi internasional yang membantu menangani ketahan pangan seperti organisasi internasional FAO (*Food and Agriculture Organization*) ini didirikan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1945, FAO ini bersifat netral tidak memihak negara manapun. FAO berupaya untuk mengatasi kelaparan dan meningkatkan ekonomi lokal dengan cara membantu negara anggota melakukan modernisasi dan juga meningkatkan praktik

pertanian, kehutanan serta perikanan. Dengan melihat sumber daya alam yang baik jika tidak dilakukan modernisasi dan juga peningkatan praktik, masyarakat tidak bisa berkembang dengan sumber daya alam yang hanya itu-itu saja, hal ini dapat menjadi ketahanan pangan menjadi memburuk. FAO membantu negara yang mengalami kelemahan pada ketahanan pangan seperti bekerjasama dengan Papua New Guinea, yang telah bergabung dengan organisasi internasional FAO pada tahun 1975, kerjasama dilakukan dengan dibukanya kantor negara pada tahun 2013 (FAO, 2018).

Papua New Guinea merupakan negara yang berada di kepulauan di bagian barat daya Samudera Pasifik dan merupakan kepulauan terbesar di Pasifik. Negara beriklim tropis yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, perkebunan, serta laut yang luas, dengan melimpahnya Sumber Daya Alam hal ini menjadikan mata pencaharian penduduk di Papua New Guinea kebanyakan meningkatkan perekonomian dalam bidang pertanian dan perikanan. Sumber Daya Alam yang melimpah seperti hasil dari pertanian berupa kopi, kakao, vanila, karet, teh, gula, buah-buahan, kentang, kopra (Iskandar, 2022). Sektor pertanian telah menghidupi sekitar 85% penduduk, terutama di daerah pedesaan, yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian (*Departement of Agriculture and Livestock, 2020*). Namun dengan melimpahnya sumber daya alam Di Papua New Guinea masih mengalami kelemahan ketahanan pangan yang telah mengakibatkan kekurangan gizi. Ini telah terdapat korban sejumlah 44,4% balita memiliki status kekurangan gizi dan 48,9% berjenis kelamin laki-laki (Khoiriyah et al., 2024). Kekurangan gizi yang menyebabkan hingga sepertiga dari kematian anak di bawah lima tahun yang terjadi di lingkungan rumah sakit, selain itu data dari LSM *Save the Children*, yang menemukan kekurangan gizi yang menyebabkan sekitar 76% dari total kematian anak balita di seluruh fasilitas kesehatan (Giay, 2018). Papua New Guinea juga memiliki karakteristik pada penduduknya yang cukup unik dibandingkan dengan negara di bawah Australia lainnya, *stunting* perawakan pendek pada anak-anak adalah hal yang sangat umum terjadi dan dianggap sebagai sesuatu yang normal sehingga seringkali tidak disadari bahwa kondisi ini cukup meluas dan merugikan Papua New Guinea (Khoiriyah et al., 2024). Dalam laporan survei rumah tangga pedesaan pada tahun 2023, jika sebagian besar rumah tangga pedesaan di Papua New Guinea menghadapi kerawanan pangan. Setelah dilihat perkiraan asupan kalori yang dilaporkan oleh rumah tangga yang disurvei dengan ambang batas kalori minimum berdasarkan perawakan tubuh masyarakat Papua New Guinea, 45% rumah tangga yang mengkonsumsi jumlah kalori harian yang memenuhi ambang batas kalori, untuk yang memenuhi kalori sekitar 35% individu (*Australian National University, 2024*).

Faktor yang dapat mempengaruhi tidak terjadinya ketahanan pangan secara berkelanjutan karena penduduknya belum dapat mengelola hasil pertanian dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti keberlangsungan bahan makanan yang dapat digunakan secara berkelanjutan, oleh karena itu terjadi kerawanan pangan atau *food insecurity* di Papua New Guinea. Selain karena faktor sumber daya manusianya juga lebih kepada faktor alam karena hal ini kurang mendukung seperti terjadi bencana alam, curah hujan tidak menentu yang membuat masyarakat kesusahan dalam menjalankan perekonomian karena mata pencaharian masyarakat Papua New Guinea terdapat di pertanian. Selain itu juga terdapat faktor lingkungan keluarga yang kurang mendukung dalam hal pengetahuan tentang kesehatan dan kebutuhan kalori setiap harinya.

Penanganan isu ini telah dijalankan oleh pemerintah nasional maupun internasional, seperti bantuan FAO kepada Papua New Guinea untuk mencapai ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan dengan melihat lingkungan agar faktor yang mempengaruhi angka kekurangan gizi yang terjadi dapat menurun dan masyarakat dapat menggunakan sumber daya alam dengan sebagaimana mestinya dengan adanya perkembangan yang dibantu oleh FAO. Seperti memperkuat ketahanan pangan dan gizi, melalui penguatan proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketahanan sistem pangan dan dengan memastikan keamanan pangan dan gizi. Peningkatan perencanaan dan penyediaan layanan dukungan ketahanan pangan dan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang lebih besar di bidang pertanian untuk meningkatkan gizi anak dan ketahanan pangan keluarga juga ditingkatkan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta penciptaan lapangan kerja di daerah pedesaan, memastikan peningkatan pendapatan, lapangan kerja dan ketahanan pangan di wilayah intervensi, serta pembentukan rantai nilai pertanian dan perikanan yang kuat dan efisien. Ini dikembangkan dan ditingkatkan melalui kerjasama FAO dengan pemerintahan Papua New Guinea serta mitra swasta lainnya untuk prioritas kebijakan ketahanan pangan nasional Papua New Guinea (FAO, 2018). Oleh karena itu, penulis meneliti terkait bagaimana peran FAO dalam mengupayakan ketahanan pangan di Papua New Guinea pada tahun 2021-2023. Sehingga penulis bertujuan untuk mengidentifikasi faktor ketahanan pangan dan menggambarkan peran FAO sebagai organisasi internasional dalam menangani kerawanan pangan atau *food insecurity* di Papua New Guinea pada tahun 2021-2023.

LANDASAN TEORI

Teori Liberalisme Institusional

Dengan perdamaian kerjasama dapat dilakukan baik antar negara maupun organisasi internasional yang dimana kerja sama ini dapat dinyatakan baik dan berhasil dengan adanya dorongan oleh kepentingan dan keuntungan (Prayoga et al., 2015). Kerjasama tidak hanya dilakukan dalam bidang perekonomian sosial budaya, politik namun kerjasama juga dapat terjadi ketika negara tidak dapat menyelesaikan permasalahan sendiri atau memerlukan bantuan dari aktor lain seperti negara maupun organisasi internasional. Penelitian ini akan menggunakan teori liberalisme institusional untuk menganalisis kerjasama antara Papua New Guinea dengan FAO sebagai organisasi internasional. Teori liberalisme institusional ini merupakan cabang dari teori liberalisme, liberalisme institusional menurut Koehane, (2009) yaitu teori yang mendorong negara-negara untuk menciptakan kerjasama dalam institusi, institusi itu sendiri adalah rezim internasional yang memiliki prinsip, aturan serta norma sedangkan dalam hal ini institusi ini berupa institusi formal yaitu organisasi internasional. Liberalisme institusional menyatakan bahwa lembaga internasional membantu untuk menjalin kerja sama diantara negara-negara. Terkait hal ini artinya teori liberalisme institusional menekankan prinsip multilateralisme dan kerjasama sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau kepentingan suatu negara (Ardianti et al., 2023). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan organisasi internasional sebagai rezim formal yang membantu kerjasama antara Papua New Guinea dengan FAO sebagai organisasi internasional.

Konsep Organisasi Internasional

FAO sebagai organisasi internasional membantu dan bekerja sama dengan Papua New

Guinea untuk mengupayakan kestabilan ketahanan pangan. FAO membantu Papua New Guinea dengan memberi bantuan kerjasama pembangunan pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan. Bantuan FAO ditujukan untuk mencapai ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan secara lingkungan, karena dapat dilihat jika Papua New Guinea ini memiliki sumber daya alam yang memadai namun masyarakatnya belum bisa memaksimalkan sumber daya ini serta adanya faktor yang membuat masyarakat tidak bisa memenuhi ketahanan pangan. Meskipun faktor pertanian mereka kurang baik karena cuaca, FAO memiliki cara agar ketahanan pangan dapat terjamin seperti dengan mengembangkan sistem yang efektif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan (FAO, 2018).

Menurut Archer, (2011) konsep organisasi internasional yaitu suatu struktur formal yang berkelanjutan untuk mewujudkan persetujuan antara sekurang-kurangnya dua negara yang berdaulat yang memiliki tujuan mencapai kepentingan bersama negara-negara anggota. Organisasi internasional merupakan kerjasama yang terorganisasi dalam bentuk yang lebih konkret, organisasi internasional ini dapat menjadi tempat untuk negara, maupun kelompok antar negara. Peran dalam organisasi internasional ini pasti memiliki tujuan tertentu, serta Negara yang tergabung pasti memiliki kesulitan maupun kekurangan yang ada di setiap negara nya. Negara bergabung untuk saling membantu dan menyelesaikan permasalahan yang sama di dalam setiap Negara. Seperti FAO ini merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh PBB yang ditujukan kepada internasional dalam melawan kelaparan FAO bertujuan untuk ketahanan pangan dengan memberikan akses terhadap makanan berkualitas tinggi yang cukup dalam menjalani hidup yang aktif dan sehat (PBB Indonesia, 2024). Saat ini FAO sedang bekerjasama dengan Papua New Guinea untuk mewujudkan ketahanan pangan, FAO memberikan bantuan berupa kebijakan seperti mengembangkan sistem yang efektif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, dengan adanya kebijakan yang dijalankan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan kerawanan pangan yang sedang terjadi. Yang dilakukan FAO di Papua New Guinea merupakan salah satu peran organisasi internasional untuk merekomendasikan suatu kebijakan kepada pemerintah nasional dalam menyelesaikan masalah kebijakan global.

Konsep Food Security

Penelitian ini tidak hanya menggunakan konsep organisasi internasional namun juga menggunakan beberapa konsep seperti konsep *food security*, konsep ketahanan pangan. Konsep dari *food security* dapat menjadi sebuah ancaman bagi keamanan manusia yang dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya akses terhadap ketersediaan makanan, yang kemudian dapat mengakibatkan kelaparan yang bisa mengancam kesejahteraan dan kehidupan seseorang (Busan & Hansen, 2007). Dalam penelitian ini *food security* yang dimaksud adalah melemahnya ketahanan pangan yang disebabkan karena beberapa faktor seperti faktor cuaca yang berubah-ubah dan ekstrim membuat masyarakat gagal panen dan ketahanan pangan menjadi mengkhawatirkan karena masyarakat bergantung dengan sumber daya alam yang tersedia namun masyarakat belum bisa mengembangkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi di sektor pertanian dan perhutanan yang membuat perekonomian masyarakat hanya mengandalkan sumber daya alam yang terbatas dan tidak berkembang terjadilah kerawanan pangan ini.

Konsep Ketahanan Pangan

Untuk konsep tentang ketahanan pangan pertama kali muncul di tahun 1970-an, saat

dilaksanakan konferensi pangan dunia *World Food Conference* pada tahun 1974 oleh PBB di Roma (Darmayanti et al., 2024). Dari fokus ketahanan pangan pada saat itu hanya menitikberatkan pada ketersediaan pangan bukan bagaimana cara manusia mendapatkan bahan makanan yang bergizi. Namun untuk Ketahanan pangan di negara diartikan sebagai kemampuan negara untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu serta layak (Nainggolan, 2013). Ketahanan pangan juga harus bersifat berkelanjutan karena hal ini mempengaruhi dalam sektor perekonomian dan sosial budaya untuk negara maupun untuk masyarakatnya sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari sangat memerlukan kebutuhan makanan dengan gizi seimbang. Oleh karena itu pemerintahan Papua New Guinea memiliki kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, dengan peningkatan produktivitas pertanian dapat memenuhi ketahanan pangan di negaranya seperti meningkatkan konsumsi dari produksi sendiri yang akan menghasilkan lebih banyak pendapatan untuk membeli makanan yang lebih bergizi dan memperoleh pelayanan kesehatan, dan dengan menyetarakan serta menurunkan harga pangan, ketahanan pangan akan merata dan stabil dan dengan ini akan mensejahterakan masyarakat (FAO, 2018).

Penelitian terdahulu juga menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian. Karya yang pertama penelitian milik Prawoto, (2023) dengan judul “Upaya *Food And Agriculture Organization* dalam menciptakan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur”. Sedangkan karya yang kedua penelitian milik Fajariyah, (2023) dengan judul “Rekomendasi kebijakan *Food And Agriculture Organization* dalam membantu mencapai ketahanan pangan Indonesia pada masa pandemi COVID-19”. Lalu yang ketiga penelitian milik Darmayanti et al., (2024) dengan judul “Peran *Food And Agriculture Organization* dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Kamboja tahun 2016-2018”. Secara keseluruhan penelitian terdahulu hanya membahas peran *Food And Agriculture Organization* di berbagai negara. Oleh karena itu, penelitian ini membawakan pembaharuan dimana membahas peran *Food And Agriculture Organization* di wilayah yang berbeda yaitu di Papua New Guinea, karena Papua New Guinea juga tengah mengalami kerawanan ketahanan pangan. Maka upaya untuk menangani kerawanan pangan di Papua New Guinea cukup penting dan bertujuan untuk menekan angka kerawanan pangan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Menurut Sugiyono, (2017) menjelaskan dalam tiga langkah dalam menganalisis data deskriptif kualitatif yaitu dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian Kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan peran FAO (*Food and Agriculture Organization*) dalam mengupayakan ketahanan pangan di Papua New Guinea tahun 2021-2023. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif unit amatan pada penelitian ini adalah ketahanan pangan di Papua New Guinea dan unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada peran FAO dalam membantu mengupayakan ketahanan pangan di Papua New Guinea tahun 2021-2023. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Food Security di Papua New Guinea

Papua New Guinea melimpah akan sumber daya alam mineral serta sumber daya alam terbarukan seperti pertanian, hutan dan laut. Selain itu Papua New Guinea memiliki iklim tropis yang suhunya bisa mencapai 32°C, oleh karena itu, negara ini juga dipenuhi oleh hutan hujan tropis yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat di Papua New Guinea sebagai sumber penghasil obat-obatan, sumber air yang baik untuk lingkungan. Penduduk yang hidup di sekitar hutan tropis sudah pasti hidupnya bergantung kepada sumber daya hutan (PPID, 2018). Namun Papua New Guinea merupakan wilayah yang mengalami kondisi kerawanan pangan akibat dari berbagai faktor seperti cuaca, serta permasalahan pemerintahan dan juga penduduknya oleh karena itu membuat FAO tertarik untuk membantu menangani permasalahan pangan yang terjadi, dengan melakukan kerjasama melalui pemerintah Papua New Guinea agar kedepannya dapat tercapai kondisi ketahanan pangan yang merata. Berdasarkan laporan milik *Regional Humanitarian Response Strategy Reviewed* pada poin pertanian, dikatakan jika sektor pertanian tetap terus menyediakan pendapatan, makanan, dan nutrisi bagi lebih dari 80% untuk penduduk pedesaan namun masih terdapat yang kurang beruntung oleh karena itu tetap menjadi sektor yang paling rentan, terpapar dampak bencana yang dapat mengancam jiwa dan keadaan darurat. Lebih dari separuh 57% penduduk mengalami kerawanan pangan sedang hingga parah. Di Papua New Guinea telah mengalami kekeringan parah yang berdampak pada ketahanan pangan, mata pencaharian, dan air, selain itu juga hama dan penyakit pertanian dan bencana alam hal ini diketahui berdampak pada produksi, pemasaran, dan konsumsi dalam ketahanan pangan menjadi dampak buruk bagi rumah tangga untuk memenuhi pasokan pangan yang bergizi dan berkesinambungan (*Highlands Violence, 2023*).

Dengan terjadinya kerawanan pangan yang terjadi di Papua New Guinea, hal ini dibahas pada United Nations Peacebuilding yang mengatakan jika perubahan iklim yang terjadi dapat memperparah tantangan mendasar seperti kelangkaan sumber daya, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, pengucilan, dan pertumbuhan populasi. Kondisi ini dapat menyebabkan persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam yang semakin menipis, bahkan terjadinya sengketa tanah dan pengungsian internal, yang dapat memicu potensi konflik kekerasan. Selain itu untuk perempuan dan anak-anak juga memiliki tantangan yang menimpa karena perempuan dan anak perempuan menjadi berperan penting dalam pengasuh yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan, air, dan energi bagi keluarga dan masyarakat mereka. Seiring meningkatnya variabilitas iklim dan peristiwa cuaca ekstrem, pemenuhan kebutuhan ini menjadi lebih sulit, dan dalam banyak kasus kelaparan yang terjadi (UNDP, 2024).

Selain faktor cuaca yang ekstrim keadaan keluarga dan juga lingkungan juga mempengaruhi terpenuhinya ketahanan pangan karena diketahui jika faktor keluarga yang mempengaruhi karena dari pendidikan kedua orang tuanya dapat dibilang rendah membuat kejadian kekurangan gizi pada balita, karena pendidikan ibu balita dikaitkan dengan daya terima orang tua terhadap pengetahuan pendidikan kesehatan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Khoiriyah et al., 2024). Seperti perempuan yang hidup dengan pertanian subsisten tradisional, 80% penduduk Papua New Guinea yang berjumlah 8.5 Juta jiwa tidak memiliki akses makanan bernutrisi untuk menjamin kehamilan yang sehat.

Bahkan masyarakat tidak pernah di didik dan tidak memiliki akses air bersih, untuk menyiapkan makanan dalam kondisi higienis bagi keluarganya (Giay, 2018), hal ini mengakibatkan ketahanan pangan tidak dapat terjadi yang mengakibatkan masyarakatnya mengalami *food insecurity*. Faktor lingkungan yang mempengaruhi dari perkembangan penduduk, banyak masyarakat yang bekerja di bidang pertanian namun faktor alam yang kurang mendukung membuat masyarakat kesusahan dalam menjaga makanan produktivitas pertanian dapat dibidang membuat gagal panen yang akhirnya tidak bisa mendapatkan keuntungan dari sumber penghasilan mereka, seperti pada tahun 2024 Papua New Guinea mengalami bencana alam tanah longsor di beberapa wilayah serta pada tahun 2024 juga mengalami curah hujan ekstrem yang menyebabkan banjir di wilayah sungai, kenaikan permukaan laut di wilayah pesisir (CNN Indonesia, 2024). Terjadi penebangan pohon besar-besaran di hutan tropis yang terjadi penyalahgunaan penebangan hutan dalam skala besar (Mamipoper, 2024). Dengan adanya hal ini juga membuat masyarakatnya kehilangan sumber makanan dan kesehatan lingkungan yang berdampak pada masyarakat.

This dataset is part of the data series [?]: [FAO - Food Security Indicators](#)



Tabel.1 Food Security and Nutrition Indicators

Sumber: FAO - Food Security Indicators 2023

Dilihat rata rata pasokan energi makanan pada tahun 2023 mulai menurun di angka 98%, sedangkan angka kekurangan gizi di angka 27,5% (FAO, 2023). Dimana hal ini dapat dilihat jika ketahanan pangan belum stabil, penyebab adanya pasokan makanan masyarakat belum stabil karena faktor cuaca yang membuat gagal panen dan perekonomian penduduk pedesaan yang kurang merata. Serta diketahui jika dari 2002 sampai 2023, Papua New Guinea juga kehilangan 943 kha hutan primer basah, dan menyumbang 51% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama jadi area total hutan primer basah di Papua New Guinea berkurang 2.9% dalam periode waktu ini (*Global Forest Watch, 2020*). Dengan adanya kelemahan kerawanan pangan yang mengakibatkan kekurangan gizi dapat dilihat jika ketahanan pangan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat, dengan susah akses untuk mendapatkan bahan makanan atau *food security* hal ini sangat mengancam ketahanan pangan.

Dengan adanya beberapa tantangan diatas FAO sebagai organisasi internasional

membantu mengatasi situasi kerawanan pangan yang ada di Papua New Guinea. Dalam menjalankan kerjasama dengan pemerintah Papua New Guinea, FAO bertugas untuk membantu wilayah Papua New Guinea yang sedang mengalami kerawanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian, kehutanan, kelautan yang berkelanjutan serta sistem pertanian dan pangan yang efisien melalui meningkatkan ketahanan mata pencaharian agar terbebas dari ancaman krisis. Dengan terjadinya permasalahan ketahanan pangan di Papua New Guinea, FAO ini berupaya untuk untuk meninjau dan memperbarui kebijakan keamanan pangan Papua New Guinea. Proses tersebut melibatkan fasilitasi konsultasi multipihak untuk merumuskan kebijakan baru dan memastikan bahwa lembaga pemerintah terkait memberikan masukan. Kegiatan tersebut juga mencakup penguatan koordinasi dan hubungan dengan proses kebijakan relevan lainnya yang sedang dilaksanakan di Papua New Guinea.

Kerjasama FAO dalam mewujudkan ketahanan pangan di Papua New Guinea tahun 2021-2023

Diketahui jika penduduk Papua New Guinea mata pencahariannya ada dalam sektor pertanian, kehutanan karena di Papua New Guinea memiliki hutan alam seluas 40,7 juta ha, yang mencakup lebih dari 88% wilayah daratannya. Namun pada tahun 2023, hutan alamnya telah hilang seluas 78,6 juta ha, yang setara dengan 58,0 juta ton emisi CO₂ (*Global Forest Watch, 2020*). Bagi masyarakat adat seperti suku Maisin, hutan bukan sekadar aset ekologis, tetapi fondasi kehidupan. Mereka menggantungkan hidup pada hasil hutan untuk pangan, obat-obatan, bahan bangunan, namun penebangan masih berlangsung di kawasan-kawasan yang seharusnya dilindungi hal ini hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sosial maupun ekologis (Wati, 2025). Dengan adanya hal-hal ini membuat masyarakat semakin kehilangan sumber mata pencaharian dan ketahanan pangan semakin menurun karena susahnyanya dalam mencari sumber makanan untuk masyarakat pedesaan.

Dengan adanya upaya meningkatkan praktek pemanenan hutan dan membatasi degradasi hutan untuk kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan dalam sektor kehutanan, FAO juga telah bermitra dengan Otoritas Kehutanan Nasional untuk memberikan dukungan teknis bagi revisi dan peningkatan Kode Praktik Penebangan (LCOP), prosedur Perencanaan, Pemantauan, dan Pengendalian (PMC), program pelatihan, dan sistem implementasi kode. Selain itu, Sistem Pemantauan Kehutanan Nasional didirikan berkat bantuan teknis FAO kepada Otoritas Kehutanan dan Kantor Perubahan Iklim dan Pembangunan. Laboratorium Sistem Pemantauan Lahan Satelit didirikan, dan operator terkait telah dilatih. Alat penilaian diperkenalkan untuk meningkatkan kapasitas Otoritas Kehutanan dalam melakukan pemantauan hutan nasional tahunan, dan portal web diluncurkan untuk menyediakan informasi *Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation* (REDD+) kepada publik. Informasi tersebut, bersama dengan data dari penelitian sebelumnya, digunakan untuk menetapkan Tingkat Referensi Hutan (FRL) untuk *Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation* (REDD+). Dukungan untuk meningkatkan kapasitas statistik pertanian berbagai kegiatan telah dimulai di bawah proyek strategi global dan proyek *Transmission Control Protocol* (TCP) negara untuk meningkatkan statistik pertanian dan pedesaan. Penilaian negara telah dilakukan, dan strategi jangka panjang akan dikembangkan untuk memperkuat kapasitas statistik pertanian. Berbagai

kegiatan percontohan juga sedang direncanakan untuk meningkatkan analisis dan pengelolaan data pertanian (FAO, 2018).

Bantuan dari FAO di Papua New Guinea telah dibentuk oleh kerangka pemrograman negara (CPF) pada tahun 2018-2022. Bantuan ini fokus pada tiga prioritas yaitu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat adil, produktif dan berkelanjutan dengan melalui peningkatan kapasitas untuk merencanakan dan mengelola hutan dan pertanian secara berkelanjutan serta melakukan pengelolaan spesies satwa liar dengan menggunakan adat dan cara agar berkelanjutan yang lebih baik serta memberikan langkah-langkah efektif untuk mencegah dan mengurangi penangkapan ikan ilegal. Lalu yang kedua memperkuat ketahanan pangan dan gizi, melalui penguatan proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketahanan sistem pangan dan dengan memastikan keamanan pangan dan gizi peningkatan perencanaan dan penyediaan layanan dukungan ketahanan pangan dan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang lebih besar di bidang pertanian untuk meningkatkan gizi anak dan ketahanan pangan keluarga. Untuk bantuan yang ketiga berupa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta penciptaan lapangan kerja di daerah pedesaan, memastikan peningkatan pendapatan, lapangan kerja dan ketahanan pangan di wilayah intervensi, serta pembentukan rantai nilai pertanian dan perikanan yang kuat dan efisien (FAO, 2018).

Untuk mengatasi permasalahan ini Papua New Guinea dan FAO bermitra untuk menjalankan pembangunan pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan. Terdapat beberapa kerjasama yang dilakukan seperti melakukan promosi E-Pertanian, FAO mendukung Pemerintah Papua New Guinea untuk mengintegrasikan penggunaan TIK (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) dalam rencana dan strategi pengembangan pertaniannya. Dalam konteks ini, FAO telah mendukung Pemerintah dalam mempersiapkan Strategi E-Pertanian Nasionalnya, dan berencana untuk mengujicobakan solusi TIK (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) prioritas yang diidentifikasi dalam strategi tersebut di beberapa provinsi-provinsi percontohan terpilih di Papua New Guinea. Papua New Guinea juga merupakan rumah bagi berbagai spesies dan ekosistem yang sangat beragam, serta negara ini memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia oleh karena itu mayoritas penduduk Papua New Guinea hidup dalam masyarakat tradisional yang sangat bergantung pada sumber daya hutan sebagai sumber gizi, obat-obatan, dan digunakan sebagai mata pencaharian. Namun kapasitas keberlanjutan hutan-hutan ini semakin terancam, sebagian besar disebabkan oleh penggundulan hutan, alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian, dan degradasi terkait penebangan (FAO, 2018).

Selain pertanian dan kehutanan Papua New Guinea juga memiliki sektor perikanan yang luas dan berharga dengan perairan pesisir yang sebagian besar tidak tercemar, danau dan sungai di dataran tinggi, serta lebih dari 200 mil zona penangkapan ikan. Sekitar 18% dari total stok tuna dunia ditemukan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Papua New Guinea. Dengan adanya sumber daya alam perikanan yang memadai ini terdapat kerjasama dengan Otoritas Perikanan Nasional dan Otoritas Provinsi, FAO juga melaksanakan Program kerjasama Teknis (TCP) untuk pengembangan pertanian akuakultur berbasis masyarakat yang berlokasi di provinsi Manus, program ini membantu masyarakat untuk mengembangkan sistem budidaya ikan belanak yang layak secara komersial dan ramah lingkungan. Selain itu, organisasi tersebut melaksanakan proyek program kerjasama Teknis

(TCP) untuk membantu Otoritas Perikanan Nasional dalam meminimalkan peluang penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, *Illegal Unreported and Unregulated* (IUU) di Papua New Guinea. FAO akan terus mendukung pemerintah untuk memperkuat kerangka legislatif dan tata kelolanya guna meminimalkan penangkapan ikan, *Illegal Unreported and Unregulated* (IUU) juga telah memfasilitasi akses Papua New Guinea ke Perjanjian Langkah-Langkah Negara Pelabuhan untuk menjaga hasil dari kelautan (FAO, 2018).

Pemerintah Papua New Guinea juga memiliki kebijakan untuk keamanan pangan 2018 - 2027, dengan pemerintahan berkomitmen serta menegaskan jika harus memperkuat keamanan pangan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan baik di desa maupun di perkotaan. Melalui sektor pertanian di Papua New Guinea yang cukup memiliki kepentingan utama karena dari pertanian ini menjadi sumber utama pangan, lapangan pekerjaan, serta sumber pendapatan masyarakat lebih dari 85% penduduknya yang sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan oleh karena itu pertumbuhan pertanian tetap menjadi salah satu cara terbaik untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat termiskin di Papua New Guinea yang sangat membutuhkan bantuan untuk membeli makanan bergizi. Pertanian juga menyediakan sejumlah besar pangan bagi penduduk kota dan menghasilkan sejumlah besar devisa asing dari produk ekspor tanaman pangan, sehingga memungkinkan negara untuk mengakses impor pangan dengan lebih baik. Dengan ini investasi di bidang pertanian memberikan peluang yang sangat penting untuk membangun ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan meningkatkan kesehatan. Namun, meskipun menanam, menambah nilai, dan memasarkan lebih banyak makanan berkualitas penting untuk memenuhi permintaan populasi yang meningkat pesat, hal itu saja mungkin tidak cukup untuk mencapai hasil gizi dan kesehatan yang baik. Secara khusus, bersama dengan meningkatkan kualitas pola makan, terdapat pula elemen penting yang berkaitan dengan hasil gizi dan praktik kesehatan, meliputi kesehatan reproduksi (keluarga berencana), praktik pemberian makanan bayi dan isu akses air bersih dan sanitasi, serta pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mengenai praktik gizi yang baik (*Departement of Agriculture and Livestock, 2020*).

Tujuan dari kebijakan keamanan pangan nasional ini adalah untuk membina kemitraan publik-swasta yang kuat dan dengan demikian memanfaatkan potensi pertanian untuk mempromosikan peningkatan gizi dan kesehatan dengan menyatukan pertanian petani kecil yang menguntungkan, rantai nilai pangan yang efisien, pendapatan perempuan, dan gizi anak. Implementasi kebijakan yang berhasil akan berkontribusi untuk memajukan negara menuju Visi 2050 menjadi masyarakat yang cerdas, bijaksana, adil dan bahagia, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan global 2 untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan. Kebijakan ini menggantikan kebijakan Keamanan Pangan Nasional Papua New Guinea (NFSP) 2000-2010. Kebijakan keamanan pangan 2018 - 2027 ini menetapkan arah jangka menengah hingga panjang dan memberi sinyal area prioritas untuk memfokuskan sumber daya (finansial dan manusia) guna membangun keamanan pangan berkelanjutan bagi seluruh warga Papua New Guinea. Kebijakan ini menyediakan landasan bagi perencanaan bersama untuk memandu program dan tindakan yang berkaitan dari semua pemangku kepentingan utama guna memperkuat keamanan pangan di Papua New Guinea (*Departement*

of Agriculture and Livestock, 2020).

Keberhasilan dan tantangan kerjasama FAO di Papua New Guinea

Food and Agriculture Organization telah memberikan berbagai bantuan dan upaya untuk mengatasi masalah food security di Papua New Guinea. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Papua New Guinea merupakan negara dari banyak negara yang memiliki permasalahan kekurangan gizi dan krisis ketahanan pangan yang mengganggu kesejahteraan masyarakatnya. FAO sebagai organisasi internasional hadir di Papua New Guinea untuk memberikan bantuan dari masalah-masalah tersebut. FAO telah memberikan bantuan dan berhasil untuk ketahanan dan keberlanjutan ketahanan pangan jangka panjang. Menurut Bank Dunia, lintasan pertumbuhan negara Papua New Guinea dan potensi sumber daya yang melimpah menyediakan landasan yang kuat untuk keterlibatan ekonomi yang lebih besar dengan Asia dan sekitarnya. Melalui Prakarsa Bersama, Papua New Guinea telah menjalankan investasi agrifood untuk tiga komoditas prioritas kakao, vanili, dan kelapa (FAO, 2024). Kerjasama pemerintah Papua New Guinea bersama FAO bermaksud meningkatkan daya saing prioritas investasi pada komoditas ini. Tujuan utama inisiatif ini adalah mengidentifikasi dan mengusulkan intervensi dalam area investasi terpilih untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Fokus Pemerintah Papua New Guinea saat ini adalah untuk memonetisasi sumber daya ini secara berkelanjutan, sehingga dapat berkontribusi pada aspirasi pembangunan negara. Pertanian merupakan andalan ekonomi Papua New Guinea, sektor pertanian di Papua New Guinea telah menjadikan sebagai pendapatan, lapangan kerja, keamanan pangan dan sosial, bahan baku primer untuk industri hilir dan hulu dan yang terpenting mata pencaharian masyarakat. Pertanian menyumbang sekitar 26% dari PDB negara yang diperkirakan bernilai PGK18,4 billion (USD5-6 billion). Sektor Pertanian menghasilkan pendapatan PGK2,4 billion (USD0,8 billion) setiap tahunnya. Diperkirakan bahwa petani kecil menghasilkan lebih dari K440 juta (USD147 million) setiap tahunnya terutama dari penjualan produk primer, terutama di sektor informal. Sektor Pertanian merupakan pemberi kerja terbesar bagi masyarakat Papua New Guinea baik di sektor formal maupun informal. Sektor ini mempekerjakan 6-7 juta penduduk di pedesaan Papua New Guinea. Mayoritas dari masyarakat ini terlibat dalam kegiatan pertanian semi-subsisten. Para petani ini juga menghasilkan 80-90% komoditas tanaman ekspor kita selain kelapa sawit (FAO, 2024).

Meskipun ekonomi Papua New Guinea tumbuh pesat, sekitar 40 persen penduduk Papua New Guinea hidup di bawah garis kemiskinan nasional, terutama di daerah pedesaan. Pertanian tetap menjadi salah satu sektor prioritas Pemerintah Papua New Guinea berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah IV 2022-2027 dan Rencana Sektor Pertanian Nasional 2024-2033 (FAO, 2024). Tidak hanya itu dalam menjalankan program yang telah dibantu oleh FAO dan kebijakan pemerintah Papua New Guinea, masih terdapat tantangan yang beragam. Papua New Guinea telah menghadapi permasalahan seperti isu internal tentang keamanan dan stabilitas, kekerasan berbasis gender, aktivitas ilegal di laut teritorial dan insiden di kawasan perbatasan, serta adanya dampak negatif dari perubahan iklim yang ekstrim dan juga bencana alam yang melanda akibat dari tidak menentukannya cuaca. Hal ini lah yang menjadi tantangan dan hambatan untuk FAO dalam menjalankan kerjasama serta menjalankan program yang telah dibentuk. Banyak daerah pedesaan yang sulit untuk

dijangkau dengan adanya faktor cuaca dan kondisi di lingkungan serta infrastruktur yang membuat menghambat berjalannya program ini. Terlepasnya hambatan dan juga tantangan yang dihadapi FAO selama menjalankan tugasnya di Papua New Guinea, FAO telah berhasil menjalankan perannya dalam banyak aspek dan tentu saja masih banyak yang harus dilakukan kedepannya untuk memastikan peningkatan keamanan pangan bagi Papua New Guinea.

KESIMPULAN

FAO memiliki peran untuk meningkatkan ketahanan pangan di Papua New Guinea dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi pada tahun 2021-2023. FAO sebagai organisasi internasional berperan membantu dan berupaya meningkatkan ketahanan pangan dalam kerawanan pangan di Papua New Guinea. Disini FAO membantu dalam memberikan kebijakan dan program untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti Program kerjasama teknis, kerangka pemrograman negara serta FAO fokus pada tiga prioritas yaitu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat adil, produktif dan berkelanjutan. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan FAO dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya bantuan program dan kerjasama yang dilakukan FAO dengan pemerintah Papua New Guinea. Terdapat perubahan yang cukup signifikan untuk masyarakat Papua New Guinea seperti cara menjalankan sektor pertanian agar dapat berkelanjutan, serta seperti salah satu tanaman pertanian unggulan yaitu kakao dengan volume produksi 43.000ton biji kakao kering yang bernilai USD 84 juta per tahun. Tanaman ini dibudidayakan di total area penanaman 150.000-200.000 ha dengan potensi peningkatan total produksi melalui input investasi tertentu, hampir semua kakao yang diproduksi di Papua New Guinea diekspor dalam bentuk biji kakao kering, dengan hal ini dapat memberi peningkatan pada perekonomian penduduk.

Hasil dari pembahasan tersebut kemudian penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi mengenai isu ketahanan pangan yang terjadi di Papua New Guinea. Untuk pemerintah di Papua New Guinea diharapkan untuk bisa bertindak lebih baik lagi dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi serta kebijakan yang ada dapat dijalankan untuk kemajuan dan kesejahteraan penduduk di Papua New Guinea agar kerawanan pangan yang terjadi ini dapat berkurang dan penduduk juga dapat meningkatkan perekonomian supaya tidak terjadi lagi krisis kemanusiaan di negara. Pemerintah juga dapat meningkatkan infrastruktur, bekerjasama dengan negara lain dalam sektor pertanian agar dapat melakukan ekspor hasil pertanian negara yang lebih berkembang, serta melakukan pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat menggunakan sumber daya lam ini sebagai sumber mata pencaharian yang berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan penduduk di Papua New Guinea.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Archer, C. (2011). *International Organizations* (Third). International Organization.
- [2] Ardianti, D. E., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2023). Di Bawah Spirit Liberal - Institusionalisme: Kajian Komparatif Gagasan Dynamic equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo - Pacific. *Indonesia Perspective*, 8.
- [3] Australian National University. (2024). *Food security challenges in rural PNG*.

- [4] Busan, B., & Hansen, L. (2007). *International Security: Vol. III (III)*. SAGE Publications Ltd.
- [5] CNN Indonesia. (2024, March 30). *PM Papua Nugini Salahkan Hujan Ekstrem Jadi Penyebab Longsor Parah*. CNN Indonesia.
- [6] Darmayanti, M. I. D., Priadarsini, N. W. R., & Resen, P. T. K. (2024). The Role of the Food and Agriculture Organization (FAO) in Effort to Tackle Food Insecurity in Cambodia 2016-2018. *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional*, 3(2).
- [7] Departement of Agriculture and Livestock. (2020). *Papua New Guinea National Food Security Policy 2018-2027*. FAO.
- [8] Fajariyah, M. A. (2023). *Rekomendasi kebijakan Food And Agriculture Organization Dalam membantu mencapai ketahanan pangan indonesia pada masa pandemi COVID-19*.
- [9] FAO. (2018). *Papua New Guinea and FAO*.
- [10] FAO. (2023). *Papua New Guinea - Food Security and Nutrition Indicators*. FAO.
- [11] FAO. (2024). *Papua New Guinea Investmet Plant and Opportunities HiH Investment Forum 2024*.
- [12] Giay, E. (2018). *Krisis kekurangan gizi ancam masa depan Papua Nugini*.
- [13] Global Forest Watch. (2020). *Papua New Guinea Deforestation Rates & Statistics*. Global Forest Watch.
- [14] Highlands Violence. (2023). *Papua New Guinea. Global Crisis Response*.
- [15] Iskandar, M. I. (2022). *Profil Negara Papua Nugini: Letak, Luas Wilayah, dan Bahasa*.
- [16] Khoiriyah, R., Mahmudiono, T., & Nadhiroh, S. R. (2024). Pengaruh Determinan Tidak Langsung Stunting dengan Kejadian Stunting Balita di Papua New Guinea Tahun 2018. *Amerta Nutrition*.
- [17] Koehane, R. O. (2009). *The Demand for International Regimes. International Organization* (2nd ed., Vol. 36). Cambridge University Press.
- [18] Mamipoper, D. (2024). *Masyarakat Sipil Papua Nugini Desak Tindakan atas Penerbangan Liar*. Jubi.Id.
- [19] Moh, L., Fadila, A., & Putri, N. A. (2023). Analisis Perkembangan Ketahanan Pangan di Indonesia: Pendekatan Menggunakan Big Data dan Data Mining. *Nusa Tenggara Barat. Seminar Nasional Official Statistics*.
- [20] Nainggolan, K. (2013). *Menjaga Keberlangsungan Ketahanan Pangan. Jurnal Pangan*.
- [21] PBB Indonesia. (2024). *Entitas-entitas PBB di Indonesia*. PBB Indonesia.
- [22] PPID. (2018). *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Bermanfaat Nyata Bagi Kelestarian*.
- [23] Prawoto, A. (2023). *Upaya Food And Agriculture Organization dalam menciptakan ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur*.
- [24] Prayoga, I., Kurianti, P. S., Fidowaty, T., Adibowo, R., Juliano, S., & Putri, S. O. (2015). Pendekatan Komunikasi Antar Budaya Tentang Penerapan Aturan Perda K-3 dan Kebiasaan Masyarakat Kota Bandung dalam Membuang Sampah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 5(1).
- [25] Rumawas, V. V, Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintahan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1.

- [26] Silvia, M. (2022). *Determinan ketahanan pangan provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- [27] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- [28] UNDIKNAS. (2024). *SDG: Pengertian, Tujuan dan Sasaran*.
- [29] UNDP. (2024). *The Peacemakers of Papua New Guinea*. UNDP.
- [30] USIP. (2025). *The Current Situation in Papua New Guinea*.
- [31] Wati, Y. (2025). *Papua Nugini dan Pertaruhan Hutan Tropisnya di Pasar Karbon*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN